

RUNTUHNYA KHILAFAH TURKI UTSMANI 3 MARET 1924

Miftahul Jannah

Pendidikan Sejarah, IKIP-PGRI Pontianak

Email: ummu.fakhri87@gmail.com

Abstrak

Tulisan dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui proses runtuhnya Khilafah Turki Ustmani tanggal 3 maret 1924 dan dampaknya terhadap kehidupan umat Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah prosedur sejarawan Untuk melukiskan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan pada masa lampau dengan langkah-langkah penulisan sejarah sebagai berikut: (1) heuristik, (2) kritik, (3) interpretasi dan (4) historiografi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Khilafah Turki Ustmani dihancurkan dengan cara menghapus sistem kekhilafahan dan menggantinya dengan sistem republik oleh seorang keturunan yahudi yaitu Mustafa Kemal Attatur. Selama 14 abad kaum muslimin hidup dalam pemerintahan Islam yang mana diterapkan hukum-hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Namun sayangnya hari itu tepatnya 3 maret 1924 secara resmi dengan bantuan Inggris, Mustafa Kemal Attaturk mengubah khilafah dengan sistem Republik Turki dan sampai hari ini sistem tersebut masih berjalan. Runtuhnya khilafah menyebabkan munculnya persoalan kaum muslimin mulai dari kolonialisme, konflik di Negara dunia ketiga, persoalan ekonomi, politik dan sosial budaya.

Kata Kunci: Khilafah Turki Ustmani, 3 maret 1924

Abstract

The writing in this journal aims to find out the process of the collapse of the Ottoman Caliphate on March 3, 1924 and its impact on the lives of Muslims. The method used in this study is the historical method. Historical method is the procedure of historians to describe the story of the past based on traces left in the past by the steps of historical writing as follows: (1) heuristics, (2) criticism, (3) interpretation and (4) historiography.

Based on the research conducted, it can be concluded that: the Ottoman Caliphate was destroyed by removing the Caliphate system and replacing it with a republic system by a descendant of the Jews namely Mustafa Kemal Attatur. For 14 centuries the Muslims lived in an Islamic government which applied Islamic laws in all aspects of life. But unfortunately that day to be exact 3 March 1924 officially with the help of Britain, Mustafa Kemal Attaturk changed the Caliphate with the system of the Republic of Turkey and to this day the system is still running. The collapse of the Caliphate caused the emergence of problems of the Muslims ranging from colonialism, conflict in third world countries, economic, political and socio-cultural issues.

Keywords: *the Caliphate of Turkish Ottoman, March 3, 1924*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama sempurna yang tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, namun juga mengatur aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti aspek politik, ekonomi, pendidikan, militer, dan budaya. Karenanya wajar

bila Islam mewajibkan eksistensi negara untuk merealisasikan semua aturan tersebut, sebab tanpa negara mustahil segala aturan bernegara dan bermasyarakat itu dapat terwujud. Secara praktis, kehidupan bernegara tersebut dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW setelah beliau berhijrah ke Madinah (23 September 622 M). Pada saat itu beliau tidak hanya berfungsi sebagai Nabi, namun juga berfungsi sebagai penguasa (al-hakim) dalam kepemimpinan negara (*ri`asah ad-daulah*). Sebagai kepala negara

Rasulullah SAW menerapkan Syariat Islam di segala bidang di dalam negeri dan menyebarkan risalah Islam ke luar negeri melalui dakwah dan jihad fi sabilillah. Pada saat beliau wafat (12 Rabiul Awal 11 H / 6 Juni 632 M), fungsi kenabian terputus dan terhenti. Namun fungsi kepemimpinan negara terus dilanjutkan oleh para shahabat dalam sebuah sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah.

Khilafah inilah yang kemudian dengan berbagai pasang surutnya menghiasi sejarah Islam selama 13 abad hingga kehancurannya di tangan Mustafa Kamal –seorang antek-antek Inggris– pada tanggal 3 Maret 1924 di Turki. Dengan demikian Mustafa Kamal telah mengokohkan sistem sekuler yang diadopsinya dari para imperialis, yakni sistem republik, yang telah diumumkan sebelumnya oleh Dewan Nasional Turki pada 29 Oktober 1922.

Sikap Mustafa Kamal yang sangat keji itu sungguh merupakan aksi kriminal paling akbar pada abad ke-20 lalu, yang tercatat sebagai episode paling hitam dalam lembar sejarah umat Islam. Betapa tidak, runtuhnya Khilafah sesungguhnya adalah pengkhianatan total terhadap Islam itu sendiri, sebab tegaknya Islam secara sempurna bergantung sepenuhnya pada eksistensi Khilafah. Hancurnya Khilafah berarti berakhirnya penerapan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan dan terhentinya penyebaran risalah Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad fi sabilillah. Hancurnya Khilafah berarti pula lunturnya jatidiri Islam yang hakiki sebagai ideologi dan sistem kehidupan. Islam pun akhirnya tidak lagi mengatur urusan-urusan publik, namun hanya menjadi agama yang bersifat pribadi yang hanya mengurus ibadah ritual dan aspek moral, seperti halnya agama Kristen.

Runtuhnya Khilafah, dengan demikian, telah menjadi *ummul jara'im*, yakni biang segala malapetaka, kejahatan, dosa, dan kerusakan yang menimpa umat Islam. Kiranya akan sulit memperkirakan betapa besarnya malapetaka dan kejahatan yang terjadi akibat hancurnya Khilafah itu.

METODE

Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif serta melakukan penilaian secara kritis dalam bentuk tulisan.

Menurut Nugroho Notosusanto, tahapan penelitian sejarah terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi dan penulisan (Notosusanto, 1975: 35). Heuristik, Langkah awal dalam metode sajarah adalah heuristik menemukan atau mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berupa jejak-jejak masa lampau melalui studi Pustaka, sumber lisan maupun lewat pengamatan lapangan baik yang primer mapun yang sekunder. Verifikasi, Kritik Sumber merupakan kegiatan meneliti untuk menentukan validitas dan reliabilitas sumber sejarah melalui kritik ekstern dan intern (Kuntowijoyo, 2003: 100-101). Kritik eksternal dilakukan dengan melihat fisik dokumen yang digunakan, apakah salinan asli atau tidak. Kritik ekstern digunakan pula untuk melihat tanggal, tahun pembuatan dokumen, serta digunakan untuk mencermati tanggal, tahun penulisan dan pengarang pada sumber sekunder. Kritik intern berkaitan erat dengan masalah kredibilitas yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran sumber tersebut.

Proses interpretasi dibagi dalam dua tahap, yaitu analisis dan sintesis. Dengan interpretasi penulis menafsirkan fakta sejarah yang telah ditemukan yang telah melalui proses verifikasi, dengan demikian hasil penelitian ini akan menjadi sebuah karya sejarah. Historiografi, Historiografi merupakan kegiatan penyampaian sintesis dari penelitian yang ditulis secara kronologis. Historiografi merupakan kegiatan menyusun fakta-fakta menjadi sebuah kisah sejarah setelah melakukan pencarian sumber, penilaian sumber dan penafsiran sumber yang kemudian dituangkan menjadi sebuah kisah sejarah dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Runtuhnya Khilafah

Khilafah Islamiyah secara resmi dihapuskan pada 3 Maret 1924, 95 tahun silam. Hilangnya sistem Khilafah berarti hilangnya sebuah sistem peradaban Islam yang menyatukan Dunia Islam di bawah satu kepemimpinan berlandaskan syariat Islam. Hilangnya sistem Khilafah juga berarti hilangnya Negara Islam yang, menurut Dr. Yusuf Qaradhawi, merupakan perwujudan dari ideologi Islam.

Sebagaimana diketahui, para sejarawan membagi sejarah Khilafah Islam menjadi empat masa: (1) Khulafaur Rasyidin (632-661 M); (2) Khilafah Bani Umayyah (661-750 M); (3) Khilafah Bani Abbasiyah (750-1517 M); (4) Khilafah Utsmaniyah (1517-1924 M).

Walhasil, Kekhilafahan Islam berlangsung kurang-lebih 13 abad; sebuah usia yang sangat panjang untuk ukuran sebuah negara ideologis yang sangat besar, yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi hampir 2/3 bagian dunia—mencakup seluruh Timur Tengah, sebagian Afrika, dan Asia Tengah; di sebelah timur sampai ke negeri Cina; di sebelah barat sampai ke Andalusia (Spanyol), selatan Prancis, serta Eropa Timur (meliputi Hungaria, Beograd, Albania, Yunani, Rumania, Serbia, Bulgaria, serta seluruh kepulauan di Laut Tengah).

Di Balik Keruntuhan Khilafah

Para ahli sejarah sepakat, bahwa zaman Khalifah Sulaiman al-Qanuni (926-974 H/1520-1566 M) merupakan zaman kejayaan dan kebesaran Khilafah Utsmaniyah. Pada masa ini, Khilafah Utsmaniyah telah jauh meninggalkan negara-negara Eropa di bidang militer, sains, dan politik. Namun sayang, setelah Sulaiman al-Qanuni meninggal dunia, Khilafah mulai mengalami kemerosotan terus-menerus.

Secara internal, ada dua faktor utama yang menyebabkan kemunduran Khilafah Utsmaniyah.

Pertama: buruknya pemahaman Islam. Kedua: kesalahan dalam menerapkan Islam. Pada masa ini, misalnya, terjadi banyak penyimpangan dalam pengangkatan khalifah, yang justru tak tersentuh oleh undang-undang. Akibatnya,

setelah berakhirnya kekuasaan Sulaiman al-Qanuni, yang diangkat menjadi khalifah justru orang-orang yang tidak mempunyai kelayakan atau lemah.

Sementara itu, di luar negeri, sejak penaklukan Konstantinopel oleh Khilafah pada abad ke-15, Eropa-Kristen telah melihat penaklukan ini sebagai awal dari Masalah Ketimuran. Masalah Ketimuran inilah yang mendorong Paus Paulus V (1566-1572 M) untuk menyatukan negeri-negeri Eropa yang sebelumnya terlibat dalam konflik antaragama: Protestan dan Katolik. Konflik ini baru bisa diakhiri setelah diselenggarakannya Konferensi Westavalia tahun 1667 M.

Pada saat yang sama, penaklukan Khilafah Utsmaniyah pada tahun-tahun tersebut telah terhenti. Kelemahan Khilafah Utsmaniyah pada abad ke-17 M itu dimanfaatkan oleh Austria dan Venesia untuk memukul Khilafah. Melalui Perjanjian Carlowitz (1699 M), wilayah Hungaria, Slovenia, Kroasia, Hemenietz, Padolia, Ukraina, Morea dan sebagian Dalmatia lepas; masing-masing ke tangan Venesia dan Habsburg.

Bahkan Khilafah Utsmaniyah terpaksa harus kehilangan wilayahnya di Eropa, setelah kealahannya dari Rusia dalam Perang Crimea pada abad ke-18 M. Nasib Khilafah Utsmaniyah semakin tragis setelah dilakukannya Perjanjian San Stefano (1878) dan Berlin (1887 M) (Zallum:1990)

Di sisi lain, karena lemahnya pemahaman terhadap Islam, para penguasa ketika itu mulai membuka diri terhadap demokrasi, yang didukung oleh fatwa-fatwa Syaikh al-Islam yang penuh kontroversi. Bahkan, dengan dibentuknya Dewan Tanzimat tahun 1839 M, tsaqafah Barat di Dunia Islam semakin kokoh, termasuk setelah disusunya beberapa undang-undang, seperti UU Acara Pidana (1840 M) dan UU Dagang (1850 M) yang bernuansa sekular.

Keadaan ini diperparah dengan dirumuskannya Konstitusi 1876 oleh Gerakan Turki Muda, yang berusaha untuk membatasi fungsi dan kewenangan Khalifah. Boleh dikatakan, saat itu sedikit demi sedikit telah terjadi sekularisasi terhadap Khilafah Islam.

Di dalam negeri, ahlu dzimmah—khususnya orang Kristen—yang mendapatkan hak istimewa pada zaman Sulaiman al-Qanuni, pada akhirnya

menuntut persamaan hak dengan kaum Muslim. Namun, hak-hak istimewa ini akhirnya dimanfaatkan untuk melindungi para provokator dan mata-mata asing, dengan jaminan perjanjian; masing-masing perjanjian Khilafah Utsmaniyah dengan Bizantium (1521 M), Prancis (1535 M), dan dengan Inggris (1580 M).

Dengan hak-hak istimewa ini, populasi orang-orang Kristen dan Yahudi di dalam negeri meningkat. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh kaum misionaris untuk melakukan gerakannya secara intensif di Dunia Islam sejak abad ke-16 M. Malta dipilih sebagai pusat gerakan mereka. Dari sanalah mereka menyusup ke wilayah Syam pada tahun 1620 M dan tinggal di sana hingga tahun 1773 M.

Di tengah kemunduran intelektual yang dihadapi oleh Dunia Islam, mereka mendirikan berbagai pusat kajian, sebagai kedok gerakan mereka. Pusat-pusat kajian ini kebanyakan milik Inggris, Prancis, dan Amerika. Gerakan inilah yang digunakan oleh Barat untuk mengemban pemikiran mereka di Dunia Islam sekaligus menyerang pemikiran Islam. Serangan ini memang sejak lama telah dipersiapkan oleh para Orientalis Barat, yang sejak abad ke-14 M telah mendirikan Center of the Oriental Studies (Pusat Kajian Ketimuran).

Walhasil, gerakan misionaris dan orientalis itu jelas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari imperialisme Barat di Dunia Islam. Untuk menguasai Dunia Islam, Islam sebagai asas harus dihancurkan, dan Khilafah Islam sebagai penjaganya harus diruntuhkan. Untuk itu, mereka menyerang pemikiran Islam, sengaja menyebarkan paham nasionalisme di Dunia Islam, dan menciptakan stigma terhadap Khilafah Utsmaniyah, dengan sebutan *The Sick Man* (Orang Sakit).

Supaya kekuatan Khilafah Utsmaniyah lumpuh sehingga bisa dijatuhkan dengan mudah, secara intensif mereka terus memprovokasi gerakan-gerakan patriotisme dan nasionalisme di Dunia Islam agar memisahkan diri dari kesatuan Khilafah Islam. Bahkan gerakan-gerakan keagamaan juga mereka eksploitasi, seperti Gerakan Wahabi di Hijaz. Sejak pertengahan abad ke-18 M, gerakan ini telah dimanfaatkan oleh Inggris, melalui agennya, Ibn Saud, untuk menyulut pemberontakan di beberapa wilayah Khilafah, yakni Hijaz dan sekitarnya.

Pada saat yang sama, di Eropa, wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Khilafah terus diprovokasi agar melakukan pemberontakan sejak abad ke-19 M hingga abad ke-20. Begitulah, Khilafah Utsmaniyah pada akhirnya kehilangan banyak wilayahnya, hingga yang tersisa kemudian hanya Turki.

Konspirasi Barat-Yahudi Menghancurkan Khilafah

Tahun 1855 M negara-negara Eropa, khususnya Inggris, memaksa Khilafah Utsmaniyah untuk melakukan amandemen UUD sehingga dikeluarkanlah Hemayun Script pada tanggal 11 Pebruari 1855 M.

Tahun 1908 M Turki Muda yang berpusat di Salonika—pusat komunitas Yahudi Dunamah—melakukan pemberontakan.

Tanggal 18 Juni 1913 M, pemuda-pemuda Arab mengadakan kongres di Paris dan mengumumkan Nasionalisme Arab. Dokumen yang ditemukan di Konsulat Prancis di Damaskus telah membongkar rencana pengkhianatan mereka kepada Khilafah Utsmaniyah yang didukung oleh Inggris dan Prancis.

Perang Dunia I tahun 1914 M dimanfaatkan oleh Inggris untuk menyerang Istanbul, dan menduduki Gallipoli. Dari sinilah, kampanye Dardanelles yang terkenal itu mulai dilancarkan. Pendudukan Inggris di kawasan ini juga dimanfaatkan untuk mendongkrak popularitas Mustafa Kamal Pasha, yang sengaja dimunculkan sebagai pahlawan dalam Perang Ana Forta, tahun 1915 M. Kamal Pasha, seorang agen Inggris keturunan Yahudi Dunamah dari Salonika itu, akhirnya menjalankan agenda Inggris: melakukan revolusi kufur untuk menghancurkan Khilafah Islam.

Pada tanggal 21 November 1923 terjadi perjanjian antara Inggris dan Turki. Dalam perjanjian tersebut Inggris mengajukan syarat-syarat agar pasukannya dapat ditarik dari wilayah Turki, yang dikenal dengan “Persyaratan Curzon”. Isinya: Turki harus menghapuskan Khilafah Islamiyah, mengusir Khalifah, dan menyita semua harta kekayaannya; Turki harus menghalangi setiap gerakan yang membela Khilafah; Turki harus memutuskan hubungannya dengan Dunia Islam serta menerapkan hukum sipil sebagai pengganti hukum Khilafah Utsmaniyah yang bersumberkan Islam. Persyaratan tersebut diterima oleh Mustafa Kamal dan perjanjian ditandatangani tanggal 24 Juli 1923. Delapan bulan setelah

itu, tepatnya tanggal 3 Maret 1924 M, Kamal Pasha mengumumkan pemecatan Khalifah, pembubaran sistem Khilafah, mengusir Khalifah ke luar negeri, dan menjauhkan Islam dari negara. Inilah titik klimaks revolusi kufur yang dilakukan oleh Kamal Attaturk, la'natu-Llâh 'alayh. Walhasil, sejak saat itu hingga kini, sudah 82 tahun, umat Islam tidak lagi memiliki Khilafah Islam; suatu keadaan yang belum pernah terjadi selama lebih dari 13 abad sejak masa Khulafaur Rasyidin.

Dampak Keruntuhan Khilafah terhadap Umat Islam

Umat Islam telah dipecah-belah menjadi negaranegara kerdil berdasarkan konsep nasionalisme dan patriotisme mengikuti letak geografis yang berbedabeda, yang sebagian besarnya sebenarnya berada di bawah kekuasaan musuh yang kafir: Inggris, Perancis, Italia, Belanda, dan Rusia. Di setiap negara boneka tersebut, kaum kafir telah merekayasa dan mengangkat para penguasa --dari kalangan penduduk pribuminya-- yang bersedia tunduk kepada mereka, untuk mentaati instruksi-instruksi kaum kafir tersebut dan menjaga stabilitas negerinya dengan cara menindas dan menyiksa rakyatnya secara kejam tanpa perikemanusiaan.

Kaum kafir segera mengganti undang-undang dan peraturan Islam yang diterapkan di negeri-negeri Islam dengan undang-undang dan peraturan kafir milik mereka. Kaum kafir segera mengubah kurikulum pendidikan untuk mencetak generasi-generasi baru yang mempercayai pandangan hidup Barat, namun sebaliknya memusuhi Akidah dan Syariat Islam, terutama dalam masalah Khilafah. Perjuangan untuk mengembalikan Khilafah serta mendakwahnya kemudian dianggap sebagai tindakan kriminal atau terorisme yang dapat dijatuhi sanksi oleh undang-undang.

Harta kekayaan dan potensi alam milik kaum muslim telah dirampok oleh penjajah kafir, yang telah mengeksploitasi kekayaan tersebut dengan cara yang sejelek-jeleknya dan telah menghinakan kaum muslim dengan sehina-hinanya. Ringkas kata, lenyapnya Khilafah adalah lenyapnya pemelihara agama Islam, sebab sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, seorang Khalifah (Imam) sebagai

pemimpin negara Khilafah-- adalah bagaikan perisai atau benteng bagi Islam, umatnya, dan negeri-negeri Islam.

Munculnya sekularisme, Secara ideologis, sekularisme merupakan aqidah (pemikiran mendasar) yaitu pemikiran menyeluruh (fikrah kulliyah) mengenai alam semesta, manusia, dan kehidupan. Sekularisme dengan demikian merupakan qiyadah fikriyah bagi peradaban Barat, yakni pemikiran dasar yang menentukan arah dan pandangan hidup (worldview / weltanschauung) bagi manusia dalam hidupnya. Sekularisme juga merupakan basis pemikiran (al qa'idah al fikriyah) dalam ideologi kapitalisme, yang di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran lainnya, seperti demokrasi, nasionalisme, liberalisme (freedom), HAM, dan sebagainya.

Jelaslah bahwa posisi paham sekularisme sangat mendasar sebagai basis ideologi kapitalisme, sebab sekularisme adalah asas falsafi yang menjadi induk bagi lahirnya berbagai pemikiran dalam peradaban Barat. Maka barangsiapa mengadopsi sekularisme, sesungguhnya telah mengadopsi pemikiran-pemikiran Barat secara keseluruhan. Sekularisme adalah paham kufur, yang bertentangan dengan Islam. Sebab Aqidah Islamiyah mewajibkan penerapan Syariat Islam pada seluruh aspek kehidupan, seperti aspek pemerintahan, ekonomi, hubungan internasional, muamalah dalam negeri, dan peradilan. Tak ada pemisahan agama dari kehidupan dan negara dalam Islam. Karenanya wajarlah bila dalam Islam ada kewajiban mendirikan negara Khilafah Islamiyah.

Setelah hancurnya Khilafah, berbagai malapetaka politik menimpa umat Islam. Yang paling penting adalah : (1) diterapkannya sistem demokrasi, (2) terpecahbelahnya negeri-negeri muslim berdasar nasionalisme, (3), para penguasa negeri-negeri Islam didikte oleh negara-negara imperialis-kapitalis, (4) kekuatan militer di negeri-negeri Islam tunduk kepada kepentingan negara-negara imperialis-kapitalis, (5) berdirinya negara Israel di tanah rampasan milik umat Islam. Negeri-negeri muslim terpecah-belah menjadi banyak negara berdasar paham nasionalisme. Sebagai akibat tiadanya institusi pemersatu umat Islam, yakni Khilafah, kini umat Islam yang satu terpecah-belah menjadi lebih dari 50 negara berasaskan paham kebangsaan (*nation-state*). Ini adalah suatu kondisi yang

sangat jauh dari tabiat asli umat Islam sebagai umat yang satu, yang wajib hidup dalam negara yang satu dengan seorang Khalifah yang satu.

Sungguh, sejarah telah membuktikan bahwa eksistensi negara-bangsa bagi Umat Islam adalah sebuah kondisi yang abnormal yang menghancurkan persatuan umat. Kaum muslimin tak pernah mengenal paham nasionalisme sepanjang sejarahnya sampai adanya upaya imperialis untuk memecah-belah negara Khilafah pada abad ke-17 M. Mereka melancarkan serangan pemikiran melalui para missionaris dan merekayasa partai-partai politik rahasia untuk menyebarluaskan paham nasionalisme dan patriotisme. Banyak kelompok missionaris –sebagian besarnya dari Inggris, Perancis, dan Amerika– didirikan sepanjang abad ke-17, 18, dan 19 M untuk menjalankan misi tersebut. Namun saat itu upaya mereka belum berhasil. Namun pada tahun 1857, mereka mulai memetik kesuksesan tatkala berdiri Masyarakat Ilmiah Syiria (Syrian Scientific Society) yang menyerukan nasionalisme Arab. Sebuah sekolah misionaris terkemuka lalu didirikan di Syiria oleh Butros Al Bustani, seorang Kristen Arab (Maronit), dengan nama Al Madrasah Al Wataniyah. Nama sekolah ini menyimbolkan esensi misi Al Bustani, yakni paham patriotisme (cinta tanah air, *hubb al-watan*). Langkah serupa terjadi di Mesir, ketika Rifa'ah Badawi Rafi' At Tahtawi (w. 1873 M) mempropagandakan patriotisme dan sekularisme. Setelah itu, berdirilah beberapa partai politik yang berbasis paham nasionalisme, misalnya partai Turki Muda (Turkiya Al Fata) di Istanbul. Partai ini didirikan untuk mengarahkan gerak para nasionalis Turki. Kaum misionaris kemudian memiliki kekuatan riil di belakang partai-partai politik ini dan menjadikannya sebagai sarana untuk menghancurkan Khilafah.

Sepanjang masa kemerosotan Khilafah, kaum kafir berhimpun bersama, pertama kali dengan perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 ketika Inggris dan Perancis merencanakan untuk membagi-bagi wilayah negara Khilafah. Kemudian pada 1923, dalam Perjanjian Versailles dan Lausanne, rencana itu mulai diimplemetasikan. Dari sinilah lahir negara-negara Irak, Syria, Palestina, Lebanon, dan Transjordan. Semuanya ada di bawah mandat Inggris, kecuali Syria dan Lebanon yang ada di bawah Perancis. Hal ini kemudian diikuti dengan upaya

Inggris untuk merekayasa lahirnya Pakistan. Jadi, semua negara-bangsa ini tiada lain adalah buatan kekuatan-kekuatan Barat yang ada di bawah mandat mereka.

Munculnya negara-bangsa Indonesia juga tak lepas dari rekayasa penjajah menyebarkan nasionalisme dan patriotisme di Dunia Islam. Hal itu dapat dirunut sejak berdirinya negara-negara bangsa di Eropa pada abad ke-19. Perubahan di Eropa ini, dan juga adanya persaingan yang hebat antara kekuatan-kekuatan Eropa di Asia Tenggara pada paruh kedua abad ke-19, menimbulkan dampak politis terhadap negara-negara jajahan Eropa, termasuk Hindia Belanda. Dampak monumentalnya adalah dicanangkannya Politik Etis pada tahun 1901. Kebijakan ini pada gilirannya membuka kesempatan bagi pribumi untuk mendapatkan pendidikan Barat. Melalui pendidikan Barat inilah paham nasionalisme dan patriotisme menginfiltrasi ke tubuh umat Islam di Hindia Belanda, yang selanjutnya mengilhami dan menjiwai lahirnya gerakan-gerakan pergerakan nasional di Indonesia, Boedi Utomo, Jong Java, Jong Sumatra, Jong Islamieten Bond, Jong Celebes, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan sejenisnya.

Cengkeraman paham nasionalisme di tubuh umat akibat rekayasa penjajah ini, disertai hancurnya Khilafah sebagai pemersatu umat, telah membuat kesatuan umat Islam porak-poranda dan hancur-lebur. Ikatan Islam berdasar Aqidah Islamiyah digantikan ikatan kebangsaan berdasar kesamaan identitas etnis, bahasa, atau budaya. Sungguh Allah SWT tidak meridhai umat Islam terpecah-belah menjadi lebih dari 50 negara seperti sekarang ini.

Para penguasa negeri-negeri Islam dikendalikan dan didikte oleh negara-negara imperialis-kapitalis Barat. Setelah umat Islam terpecah belah, maka dengan sendirinya mereka menjadi lemah dan dapat dikendalikan dan dikontrol oleh para penjajah. Berlakulah di sini kaidah 'devide et impera' (farriq tasud) (pecah belahlah, lalu kuasai). Karena itu, terpecahbelah-nya umat Islam –akibat hancurnya Khilafah—membawa dampak buruk berikutnya, yakni para penguasa negeri-negeri Islam kemudian dapat dikendalikan dan dikontrol sesuai program negara-negara imperialis.

Hal ini misalnya dapat dilihat sejak berakhirnya Perang Dunia II. Pada saat itu banyak negara jajahan yang menuntut kemerdekaan. Menghadapi tantangan ini,

negara-negara kapitalis (terutama AS, Inggris, Perancis) kemudian melakukan konsolidasi dan merencanakan langkah-langkah untuk melanggengkan imperialisme melalui cara-cara baru. Pada Juli 1944 negara-negara penjajah itu mengadakan pertemuan di Bretton Woods (AS) yang hasilnya di bidang politik adalah: pembentukan PBB (1945) dan deklarasi HAM (1945). Di bidang ekonomi hasilnya adalah: pembentukan World Bank/IBRD (1946), pendirian IMF (1947), dan pendirian GATT (1947). Semua langkah ini tiada lain adalah teknik-teknik baru untuk terus melestarikan imperialisme di dunia.

Kekuatan militer di negeri-negeri Islam tunduk kepada kepentingan negara-negara imperialis-kapitalis Barat untuk mempertahankan sistem kehidupan sekuler. Pada saat kejayaan Khilafah, kekuatan militernya didedikasikan untuk kepentingan Islam semata, yakni untuk menjaga eksistensi negara Khilafah, menjaga penerapan Syariat Islam, menjamin keamanan rakyat, dan menyebarkan risalah Islam ke luar negeri melalui jalan dakwah dan jihad fi sabilillah.

Namun setelah Khilafah lenyap dan berdiri negara-negara sekuler, kekuatan militer di Dunia Islam –seperti halnya para penguasanya—akhirnya mengalami perubahan orientasi untuk kemudian tunduk kepada ideologi dan kepentingan negara-negara imperialis, yakni mempertahankan sistem sekuler yang ada. Hal ini misalnya terjadi di Aljazair awal 90-an tatkala kekuatan militer membatalkan hasil pemilu yang dimenangkan FIS yang bercita-cita menghancurkan sekularisme dan mendirikan Khilafah. Di Turki, ketika Arbakan (pemimpin partai Refah) tahun 1996 terpilih sebagai perdana menteri –berkoalisi dengan Tansu Chiller—Arbakan harus tunduk di bawah institusi militer yang fanatik kepada sekularisme

Berdirinya negara Israel di tanah rampasan milik umat Islam.

Pada saat Khilafah masih eksis, cita-cita kaum Yahudi untuk mendirikan negara Israel di Palestina gagal total. Namun masalahnya menjadi lain tatkala konstelasi politik Timur Tengah berubah akibat hancurnya Khilafah dan wilayah-wilayah bekas kekuasaannya dibagi-bagi di antara negara-negara imperialis. Israel akhirnya berdiri di tanah Palestina pada tahun 1948. Sejarah mencatat, Qurrah Shu Affandi, seorang petinggi Freemasonry dari Turki pernah berusaha

menyuap Sultan Abdul Hamid II (menjadi Khalifah 1876-1909) dengan imbalan agar kaum Yahudi diberi tanah di Palertina.

Hancurnya Khilafah juga mengakibatkan malapetaka-malapetaka di bidang ekonomi. Sesungguhnya malapetaka ekonomi ini sangat banyak ragamnya, namun yang menonjol adalah : (1) Penerapan sistem kapitalisme yang ribawi atas umat Islam, dan (2) perampokan kekayaan alam milik umat Islam oleh kaum penjajah yang kafir.

Pertama, Penerapan sistem kapitalisme yang ribawi atas umat Islam.

Kapitalisme adalah nama bagi sistem ekonomi yang ciri utamanya adalah pemilikan privat atas alat-alat produksi, serta pemanfaatannya dalam kegiatan produksi dan distribusi untuk memperoleh laba dalam mekanisme pasar yang kompetitif. Karena sistem ekonomi kapitalisme merupakan fenomena paling menonjol dalam peradaban Barat, maka istilah kapitalisme digunakan juga untuk menunjukkan ideologi Barat itu sendiri, sebagai suatu sistem sosial yang menyeluruh. Secara ideologis, akar kapitalisme adalah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan). Ketika agama dipisahkan dari kehidupan, maka lahirlah paham kebebasan (liberalism/freedom). Dari paham kebebasan inilah, khususnya kebebasan kepemilikan, lahirlah sistem ekonomi kapitalisme.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas maka ditarik kesimpulan bahwa proses runtuhnya khilafah tidak terlepas dari adanya campur tangan penjajah kafir yaitu Inggris yang bekerjasama dengan antek Barat yaitu Mustafa Kemal Attaturk. Melalui Perjanjian Sykes-Picot wilayah Turki dibagi-bagikan kepada negara-negara kafir penjajah. Misalnya Inggris mengambil wilayah Palestina. Tepat 3 maret 1924 secara resmi Mustafa Kemal Attaturk mengganti sistem pemerintahan umat Islam yaitu khilafah yang telah berdiri selama kurang lebih 14 abad diganti dengan sistem pemerintahan republik. Sampai saat ini umat Islam tidak lagi menerapkan Islam dalam aspek kehidupannya secara holistik. Adapaun dampak yang ditimbulkan akibat ketiadaan khilafah adalah pertama, umat Islam disekat dengan paham nasionalisme yang mengakibatkan lahirnya negara-negara bangsa

(*nasion state*). Kedua, umat Islam dikuasai (dijajah) oleh penguasa adidaya barat kafir. Ketiga, kemiskinan semakin tinggi, tingkat kriminalitas serta pendidikan yang semakin jauh dari Islam yaitu diterapkannya asas sekularisme.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah akhirnya penulis bisa menyelesaikan tulisan ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara dan rekan-rekan yang telah membantu dalam memudahkan dalam mencari literatur atau referensi terkait Khilafah Turki dalam penulisan jurnal ini. Semoga artikel dalam tulisan ini bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai alternatif referensi khususnya terkait sejarah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. 2011. *Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar
- Gottschalk, Louis. 1975. “*Understanding History: A Primer of Historical Method*”, a.b, Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Imam al mawardi. 2015. *Ahkam Sulthaniyah: Pemerintahan Khilafah Islam*. Indonesia: Qisthi Press
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Zallum, Abdul Qadim. 1990. *Kayfa Hudimat Al Khilafah*. Beirut : Darul Ummah.
- Iskandar, Arief. 4 maret 2019. *Dibalik keruntuhan khilafah 3 maret 1924*. Media umat. (online).(<https://mediaumat.news/di-balik-keruntuhan-khilafah-3-maret-1924/>, diakses tanggal 30 juni 2019).
- Al jawi Muhammad shiddiq. 2004. *Malapetaka Akibat Hancurnya Khilafah*. (<https://docplayer.info/35028987-Muhammad-shiddiq-al-jawi-malapetaka-akibat-hancurnya-khilafah.html>, diakses tanggal 30 juni 2019).
- Langit, pedang. 3 maret 2009. *Malapetaka Akibat Hancurnya Khilafah*. Artikel (<https://pedanglangit.wordpress.com/2009/03/09/malapetaka-akibat-hancurnya-khilafah/>, diakses tanggal 30 juni 2019).